

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Said Zainal, 2006, *Kebijakan Publik*, Suara Bebas, Jakarta.
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung.
- Albrow, Martin, 2005, *Birokrasi*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Ali, Zainuddin, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anderson, James E, 2006, *Public Policy Making*, Sixth Edition, Houghton Mifflin, Boston Company.
- Arikunto, Suharsini, 2006, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Badudu, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Cardoso Gomes, Faustino, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi, Yogyakarta.
- Collen A. Woodard, 2000, *Merit in Principle, Merit in Practice: An Investigation into Merit-Based Human Resources Management through the Lens of Title 5-exempt Organizations*, PhD. Disertasi, Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- Dunn, William, 1999, *Analisa Kebijakan Publik*, Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Dye, Thomas, 1981, *Understandeing Public Policy*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Eyestone, Robert, 1971, *The Treads of Public Policy: A Study in Policy Leadership*, Boobs-Merrill, Indianapolis.
- Hartanti, Sri, dkk., 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2003, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Laswell, Harold D dan Abraham Kaplan, 1970, *Power and Society*, University Press, New Haven: Yale.

- Lindblom, Charles, 1986, *Proses Penetapan Kebijakan Publik*, Edisi Kedua., Airlangga, Jakarta.
- Michael Ramesh, Howlet, 1995, *Stusying Public Policy*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Musanef, 1996, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia Jilid II*, PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Nazir, Moh, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 1998, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Pressman, J. dan Wildavsky, A, 1984, *Implementation*, University of California Prees and Los Angles, California.
- S.F. Marbun dan M. Mahfud, 2001, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Satoto, Sukanto, 2004, *Pengaturan Eksistensi & Fungsi Badan Kepegawaian Negara*, HK Offset, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P., 1996, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- 1998, *Manajemen Abad 21*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Manudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Thoha, Miftah, 2005, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Triatmojdo, Sudibyo, 1983, *Hukum Kepegawaian*, Galia Indonesia, Bogor.
- Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Wahab, Solichin Abdul, 2012, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, PT Buku Kita, Jakarta.

B. Dokumen

Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN, 2018, “Pemetaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)”, Komisi Aparatur Sipil Negara, Jakarta.

Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen PNS Badan Kepegawaian Negara, 2014, “CAT BKN Untuk Indonesia”, Biro Humas dan Protokol BKN, Jakarta.

C. Jurnal

Ajib Rakhmawanto, 2016, Analisis Model Pembinaan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian di Badan Kepegawaian Negara, Civil Service VOL. 10, No.1.

Akhmad Ulawi, Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN dan Netralitas ASN dari Unsur Politik Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Jurnal Rechtsvinding.

Indaru Setyo Nurprojo, 2014, Merit System dan Politik Birokrasi di Era Otonomi Daerah, Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. 8, No.1, Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Jenderal Soedirman.

Tedy Sudrajat, 2017, Menelaah Persoalan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

D. Hasil Penelitian

Maura Andarani, 2019, “Implementasi Sistem Merit Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Melalui seleksi Terbuka “Open Bidding” di Sekretariat Kabinet Republik Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

Hasan Basri, 2017, “Analisis Pengembangan Karir Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Merit Sistem (Studi Penelitian Di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah)”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara.

F. Sumber Internet

Bidang Informasi Kepegawaian BKN Yogyakarta, “Tentang Kami”,
<http://kanreg1bkn.id/bknone/profil-kami.html>.

Cia, “Kaum Difabel Keluhkan Sulitnya Daftar PNS”,
<https://kumparan.com/tugujogja/kaum-difabel-keluhkan-sulitnya-daftar-cpns-1539258580506531346>.

Dylan Aprialdo, “Ombudsman Terima 1.054 Laporan Masyarakat Terkait Persoalan Seleksi CPNS 2018”,
<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/03/12462961/ombudsman-terima-1054-laporan-masyarakat-terkait-persoalan-seleksi-cpns-2018>.

Hrs, “Tes CPNS Masih Diwarnai Kecurangan”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52772e8f7d593/tes-cpns-masih-diwarnai-kecurangan/>.

Irwan Syambudi, "SKD CPNS 2018 di Graha Wana Bhakti Yaksa Yogyakarta Diundur", <https://tirto.id/c8FA>.

Mohammad Bernie, "Celah Kecurangan Seleksi CPNS 2018 yang Disoroti Ombudsman", <https://tirto.id/daSJ>.

Pusat Pengkajian dan Penelitian Kepegawaian, “Dikotomi Sistem Merit dan Politisasi Birokrasi dalam Pengangkatan Jabatan ASN”, <http://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/05.Policy-Brief-Mei-2018.pdf>.